BAB III
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN KKL

3.1 Hasil Kegiatan KKL

Pada saat saya melaksanakan KKL banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang saya dapat secara langsung. Saya dapat merasakan bagaimana prakteknya berkerja secara langsung di salah satu instansi pemerintahan dalam hal ini yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten bekasi.

Melaksanakan KKL di Dinas Pendidikan kabupaten Bekasi saya melakukan banyak aktivitas yang diberikan oleh para pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, aktivitas-aktivitas tersebut berbagai macam, ada yang mudah dan sulit, beragam setiap hari nya. Namun semua nya bisa saya selesaikan dengan lancar dengan baik dengan ada nya bimbingan dan bantuan dari pembimbing saya di dinas tersebut dan juga dari para pegawai lain di dinas tersebut.

Aktivitas awal KKL saya di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yaitu dimulai dengan pengenalan dan interview dengan pembimbing instansi KKL saya. Saya memperkenalkan diri saya dan menjelaskan maksud dan tujuan saya melaksanakan KKL di dinas tersebut. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi meminta saya untuk membantu pekerjaan-pekerjaan dibagian kepegawaiannya, dan saya siap terima untuk ditempatkan dibagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Kemudian setelah saya diterima untuk melaksanakan KKL di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi saya mulai mendapat berbagai macam aktivitas pekerjaan baru yang beragam, diantaranya seperti membantu mengurus surat keluar dan masuk, membantu membuat surat edaran, membantu menyelesaikan pekerjaan yang ada dibagian PLS (pendidikan Luar Sekolah), membantu membuat surat dibagian Tata Usaha, dan membantu menyelesaikan pekerjaan yang ada dibagian Tata Usaha. Begitu lah aktivitas hari-hari saya pada saat melaksanakan KKL di Dinas pendidikan Kabupaten Bekasi.

Pada minggu ketiga pelaksanaan KKL saya selain membantu pekerjaan-pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi saya juga mempelajari program yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, seperti Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Dari PKBM itu saya mempelajari mengenai suatu wadah yang menyediakan informasi dan kegiatan belajar masyarakat yang dibuat dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri.

Kegiatan lain pada saat saya melaksanakan KKL waktu itu mendata jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi.

Dari keseluruhan sekolah yang saya data, dikabupaten Bekasi angka putus sekolah yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan SD sebanyak 239 murid;
2. Tingkat pendidikan SMP sebanyak 367 murid;
3. Tingkat pendidikan SMA sebanyak 86 murid;
4. Sedangkan pada tingkat pendidikan SMK tidak tercatat adanya angka putus sekolah.

   Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Tahun 2011

Kegiatan KKL saya mengenai Program Paket C yaitu membantu mendata Kecamatan mana saja yang ikut serta Ujian Kesetaraan Program Paket C pada agustus kemarin.

Ada 8 Kecamatan dikabupaten Bekasi yang ikut serta dalam Ujian Kesetaraan Program Paket C bulan agustus kemarin, diantaranya :

1. Kecamatan Kedungwaringin
2. Kecamatan Sukawangi
3. Kecamatan Cabang Bungin
4. Kecamatan Pebayuran
5. Kecamatan Bojongmangu
6. Kecamatan Tambelang
7. Kecamatan Muara Gembong
8. Kecamatan Cikarang Pusat

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Tahun 2011

Minggu terakhir melaksanakan KKL di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Sudah tidak banyak aktivitas yang saya lakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Secara resmi dengan keluarnya surat telah melakukan KKL saya sudah selesai melaksanakan kegiatan KKL di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Dengan melaksanakan berbagai tugas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten bekasi tersebut saya banyak belajar bagaimana berkerja di instansi pemerintahan. Saya dapat pengalaman yang sangat bagus bagaimana menjadi seorang pelayan masyarakat yang baik dan benar. Saya juga dapat mengenal banyak orang-orang yang sudah berpengalaman di instansi pemerintahan, khususnya di Dinas Pendidikan kabupaten Bekasi.

3.2 Pembahasan KKL

Sesuai instruksi dari Menteri Pendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2009 “Tentang Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C” dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2009 “Tentang Penyelenggaraan Program Paket C Kejuruan” kebijakan ini dibuat bertujuan untuk mengatasi masalah putus sekolah di Indonesia.

Program Paket C adalah program pendidikan nonformal yang setara dengan pendidikan formal SMA, yang dibuat sejak tahun 2009 sebagai alternatif program untuk mengatasi masalah putus sekolah yang harus diimplementasikan oleh tiap dinas pendidikan diseluruh daerah indonesia. Program Paket C merupakan program penyempurnaan dari program Ujian Persamaan yang sebelumnya diberlakukan. Dalam Program Paket C, siswa yang akan mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) diwajibkan untuk terlebih dahulu mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan (LPPK) sedangkan Ujian Persamaan sebelumnya tidak ada kewajiban untuk mengikuti pendidikan. Ijazah dari Paket C ini dihargai sama dengan Ijazah Sekolah Menengah

Atas (SMA) yang dapat dipergunakan untuk melamar kerja, melanjutkan kuliah di PTN atau PTS dalam dan luar negeri, penyesuaian golongan jabatan di TNI, POLRI, PNS dan pegawai swasta.

Masalah putus sekolah banyak terjadi di Kabupaten Bekasi yang memiliki cakupan wilayah yang luas, dan jumlah pendudukan yang besar. Kondisi ini merupakan potensi dalam pengembangan dan pembangunan Kabupaten Bekasi. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sebagai instansi yang diarahkan langsung oleh Kemendikbud harus mengimplementasikan kebijakan pendidikan kesetaraan program paket c ini untuk mengatasi masalah mengenai putus sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi.

Sebagaimana dengan Visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi adalah :

1. mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan berakhlaq

Sedangkan Misi nya adalah :

1. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan,
2. Meningkatkan mutu pendidikan, dan relevansi pendidikan,
3. Serta meningkatkan tata kelola dan pencitraan publik.

Program Paket C merupakan salah satu Program Pendidikan Non Formal. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. Penguatan satuan-satuan pendidikan non-formal melalui pengembangan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi serta penguatan kemampuan manajerial pengelolanya.
b. Menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan non-formal.
c. Penyedian informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan non-formal sesuai dengan minat, potensi, dan kebutuhan.

Dengan Grand Teori yang saya gunakan dari Edward III yang mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. *Comunication* (Komunikasi)
2. *Resources* (Sumber Daya)

3. *Disposition* (Disposisi)
4. *Bureaucratic Structur* (Struktur Birokrasi)

(Edward 1980:147)

Pertama, Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, *target group* dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengimplementasikan kebijakan pendidikan kesetaraan program paket c ini sudah baik, namun masih banyaknya kekurangan, seperti dalam hal komunikasi ini, koordinasi diantara pihak-pihak seperti masyarakat, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi khususnya bidang PKBM, dan LPPK yang terlibat untuk melaksanakan kebijakan ini belum seluruhnya berjalan dan terhubung dengan baik. Dengan begitu implementasi kebijakan ini masih terus banyak kekurangan dan kesalahan diberbagai tingkatan. Untuk memperbaiki dan menjadikan kebijakan ini berjalan dengan baik dan sukses menurut saya dinas pendidikan kabupaten bekasi perlu banyak perbaikan dalam masalah komunikasi dan koordinasi.

Kedua, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap terlaksanakanya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk

melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tanganinya. Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya menusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sumber daya peralatan juga merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi, menurut Edward III yaitu :

> “Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan”. (Edward III, 1980:102)

Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang

berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. (Edward III, 1980:103)

Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, menurut saya masih banyak kekurangan sumber daya manusia nya, SDM yang dapat berkerja secara maksimal dan profesional masih kurang dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ada.

Dari sumber daya anggaran dan peralatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sudah terpenuhi dan cukup menurut saya. Anggaran pedidikan yang diberikan langsung oleh pemerintah Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat menurut saya sudah sangat cukup untuk mengimplementasikan kebijakan Program Paket C ini dengan maksimal. Dengan anggaran yang ada, sumber daya peralatan juga dimiliki dengan cukup lengkap oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk mengimplementasikan kebijakan Program Paket C.

Ketiga, disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat tiga macam elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, antara lain:

> “Tiga elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, yaitu: pengetahuan
> (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and*

> *rejection*), intensitas terhadap kebijakan".(Van Meter dan Van Horn dalam Widodo,2007: 105)

Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, dimana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat memabantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal ini lah yang menurut saya amat berpengaruh membuat suatu kebijakan tidak berjalan dengan baik, diimplementasikan dengan asal-asalan. Di negara kita masih diperlukan pendidikan kedisiplinan untuk menciptakan karakter sumber daya manusia yang kuat, pintar, taat, dan bisa bersikap profesional. Banyak para pegawai instansi pemerintahan yang berkerja dengan asal, lambat, tidak disiplin, dan tidak ada jiwa profesionalisme nya. Mereka seperti menggampangkan semua hal yang padahal itu akan sangat berpengaruh terhadap suatu kebijakan yang harusnya mereka kerjakan. Hal tersebut dapat saya lihat pada saat saya melaksanakan KKL di dinas pendidikan kabupaten bekasi, para aparatur negara, pelayan masyarakat, pegawai pemerintahan atau apalah yang dapat disebut ini banyak sekali yang berkerja dengan tidak profesional dan malah menurut saya dibawah standar seorang aparatur negara. Hal ini yang harus dicari solusinya oleh pemerintah kabupaten bekasi untuk memperbaiki sumber daya manusia agar semua hal yang berhubungan dengan

perkerjaan untuk masyarakat dapat dikerjakan secara profesional dan tidak main-main.

Keempat, struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Didalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP).

Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sebagai salah satu instansi yang menjalankan program yang dibuat oleh Kemdikbud menurut saya sifat dan ciri-ciri tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi instansi tersebut. Pelaksanaan kebijakan pendidikan kesetaraan program paket c belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kinerja pegawai dinas pendidikan kabupaten bekasi yang kurang baik, mereka menurut saya masih lamban dan terlalu santai dalam mengerjakan segala hal. Dengan kinerja yang demikian wajar apabila program tersebut belum berjalan dengan maksimal.